

**IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DALAM  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
APARATUR DI DINAS KOPERASI USAHA KECIL  
MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN  
DHARMASRAYA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)*



**WIDYA CAHYANI**  
**NIM. 20042309**

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2024**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul                    Implementasi Reformasi Birokrasi Dalam Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Aparatur Di Dinas Koperasi Usaha  
Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya

Nama                    Widyia Cahyani

TM/SIM                2020/20042309

Program Studi        Ilmu Administrasi Negara

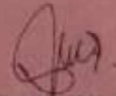
Departemen          Ilmu Administrasi Negara

Fakultas                Ilmu Sosial

Pada tanggal 09 Agustus 2024

Ditandatangani Oleh,

Pembimbing



Dr. Syarif, M.Si., Ph.D  
NIP. 196304011989031003

**PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi  
Departemen Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang

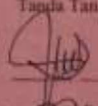
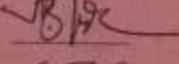
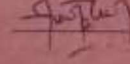
Pada hari Jumat, 09 Agustus 2024 Pukul 11.00 WIB s/d 13.00 WIB

**Implementasi Reformasi Birokrasi Dalam Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Aparatur Di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan  
Perdagangan Kabupaten Dharmasraya**

Nama : Widya Cahyani  
TM/NIM : 2020/20042309  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Departemen : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 09 Agustus 2024

**Tim Penguji :**

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Drs. Syamsur, M.Si., Ph.D	1. 
Anggota	Adil Moharak, S.IP., M.Si	2. 
Anggota	Sista Westika Putri, M.A.P	3. 

Mengesahkan  
Dekan FIS UNP.



Afriya Kusadji, SH., M.Hum., MAPA, Ph.D  
NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widya Cahyani

NIM/M : 20042309/2020

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul "**Implementasi Reformasi Birokrasi Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya**" adalah benar dan merupakan hasil karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 09 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,

A 10,000 Rupiah Indonesian stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SERBUK BAKAR' and '10000'. The signature is written in black ink over the stamp.

Widya Cahyani  
20042309

## ABSTRAK

**Widya Cahyani (20042309) Implementasi Reformasi Birokrasi Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi reformasi birokrasi dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian Implementasi Reformasi Birokrasi Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada kekurangan dalam beberapa aspek yaitu dalam segi pelatihan. Dimana pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya lebih memprioritaskan untuk pegawai PNS. Hal ini dapat menyebabkan ketidakmerataan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat karena pegawai PNS memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik daripada pegawai honorer dan THL. Faktor penghambat Reformasi Birokrasi Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Menurut Hayat (2014:42) di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya yaitu (1) Minimnya sarana dan prasarana. Seperti terbatasnya perangkat keras, ruangan kerja yang kecil serta akses internet yang kurang stabil dapat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan. (2) Minimnya anggaran. Anggaran sangat diperlukan dalam melaksanakan reformasi birokrasi karena digunakan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia. Jika anggarannya terbatas maka pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi kurang maksimal. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi faktor penghambat dalam implementasi reformasi birokrasi dalam pengembangan sumber daya manusia Menurut Sedarmayanti (2016) di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya yaitu (1) Pengembangan melalui pendidikan dan pelatihan (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah dapat dilakukan melalui Pengembangan sistem informasi pegawai yang dilakukan dengan database pegawai. (3) Sistem pembinaan sumber daya manusia. Dapat diwujudkan dengan pengembangan karier pegawai.

**Kata kunci: Reformasi birokrasi, Pengembangan sumber daya manusia dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya**

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh**

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang selalu diberikan kepada penulis, termasuk nikmat iman, nikmat islam dan sehat wal'afiat. Atas rahmat dan hidayahnya pula penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Implementasi Reformasi Birokrasi Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya ”. Penyusunan skripsi diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Studi Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penyusunan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik, tanpa bantuan dari pihak yang selalu membimbing serta mendukung penulis baik secara moril maupun materil. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Krismadinata, S.T., M.T Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Afriva Khaidir, SH., M.Hum, MAPA, Ph.D Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dra. Fitri Eriyenti, M.Pd., Ph.D Selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D selaku pembimbing skripsi dari penulis yang sudah banyak sekali memberikan bimbingan dan arahan, serta ilmu dan sarannya yang sangat membantu penulis sejak awal hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

5. Bapak Adil Mubarak, S.IP., M.Si selaku penguji I yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Sinta Westika Putri, M.A.P selaku penguji II yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen, staf pengajar serta karyawan/karyawati Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
8. Seluruh pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya.
9. Teristimewa untuk papa terhebat yakni papa Suparto atas doa yang tulus, dukungan moral, motivasi, kerja keras untuk pendidikan penulis dan cinta yang tak terhingga yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Pintu surgaku mama Jainah yang selama hidupnya senantiasa memberikan doa yang luar biasa dan selalu mencurahkan kasih sayang yang tiada henti. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi mu dihidup kami selamanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kakak tercinta Jihan Rizky Aprilia yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan Administrasi Publik Angkatan 2020.
13. Dan yang terakhir, kepada diri sendiri Widya Cahyani. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena tetap berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang tidak mudah ini. Terimakasih sudah bertahan hingga sejauh ini. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Widya. Apapun kekurangan dan kelebihan yang ada pada dirimu mari merayakan diri sendiri.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca khususnya mahasiswa Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Padang, 19 Juli 2024

Widya Cahyani



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Pembatasan Masalah .....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II.....</b>	<b>12</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Kajian Teoritis.....	12
1. Konsep Reformasi Birokrasi .....	12
2. Reformasi Birokrasi Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	15
3. Reformasi Birokrasi Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	16
4. Pengembangan Kompetensi Pegawai Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi ..	29
B. Kajian Relevan .....	39
C. Kerangka Konseptual .....	42
<b>BAB III.....</b>	<b>44</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Informan Penelitian .....	45
D. Jenis dan Sumber Data .....	46
E. Teknik Pengumpulan Data .....	47
F. Teknik Pengujian Keabsahan Data.....	48

G. Teknik Analisis Data .....	49
<b>BAB IV .....</b>	<b>50</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Temuan Umum.....	50
1. Profil Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya.....	50
B. Temuan Khusus .....	54
C. Pembahasan .....	82
<b>BAB V.....</b>	<b>98</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>104</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian .....	46
Tabel 4.1 Pegawai yang mengikuti pelatihan.....	59
Tabel 4.2 Data pegawai PNS Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya .....	73
Tabel 4.3 Data Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan jenis kelamin.....	75
Tabel 4.4 Data pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan pangkat/golongan.....	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	43
Gambar 4.1 Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya.....	50

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Reformasi merupakan hal yang sangat disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Reformasi birokrasi adalah proses penyempurnaan dan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah. Perubahan tersebut dilakukan untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan reformasi birokrasi adalah mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional, adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari, korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, dan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Perbaikan sistem birokrasi tidak lagi sekedar menjadi tuntutan seluruh lapisan masyarakat, diharapkan birokrasi khususnya institusi dapat mencapai kualitas yang lebih baik. Saat ini, reformasi birokrasi telah menjadi kebutuhan mendesak bagi para pejabat pemerintah dan berhasil menjadi landasan politik dan ekonomi yang penting bagi pembangunan demokrasi di Indonesia. Berbagai perubahan dilakukan pada sistem administrasi negara guna membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Namun banyak pihak yang berpendapat bahwa dibandingkan dengan reformasi birokrasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum, reformasi di bidang birokrasi masih tertinggal. Oleh karena itu, pemerintah dengan tegas menyatakan akan terus melakukan reformasi birokrasi untuk mencapai tujuan pemerintah dalam menerapkan good governance.

Jika birokrasinya baik, maka segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan masyarakat juga akan terlaksana dengan baik. Namun kenyataannya masih banyak kendala dan kekurangan dalam pemberian pelayanan sehingga tidak sesuai dengan harapan. Faktanya, hambatan dan kekecewaan lebih banyak terjadi karena birokrasi yang buruk. Hambatan dan kemacetan dalam suatu birokrasi dapat menimbulkan kesan negatif terhadap birokrasi. Mengingat betapa strategis dan pentingnya birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sudah saatnya birokrasi pemerintah melakukan reformasi diri, kembali ke fungsi semula yaitu melayani, bahkan mulai bertransformasi menjadi lebih dari sekedar penyedia pelayanan. Pelaksanaan reformasi birokrasi ini diperkuat oleh pemerintah Indonesia dengan menetapkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 untuk memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi. Pasal 4 (1) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menyatakan bahwa pelaksanaan operasional Grand Design Reformasi Birokrasi akan dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 tahun sekali, selaras dengan RPJM. Grand design reformasi birokrasi ini telah direncanakan untuk periode 2010–2025 dan dibagi menjadi tiga fase, yaitu fase 2010-2014, fase 2015-2019, dan fase 2020-2024. Terdapat sasaran reformasi birokrasi yang harus dicapai setiap lima tahun sekali melalui Road Map Reformasi Birokrasi dan dalam proses pelaksanaan tersebut terdapat delapan area perubahan yang meliputi: peraturan perundang-undangan, tata laksana, penguatan organisasi, sumber daya aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, dan pola pikir serta budaya kerja.

Kedelapan area tersebut, sumber daya manusia aparatur merupakan hal

yang sangat penting untuk dirubah karena manusia merupakan pelaku utama dalam kegiatan birokrasi. Dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 dijelaskan bahwa area perubahan manajemen SDM aparatur menjadi prioritas pemerintah mengingat bahwa perilaku pegawai negeri sipil sebagai aparatur sangat erat kaitannya dengan penerapan sistem manajemen SDM yang efektif. Sistem manajemen SDM mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan sampai dengan pemberhentian harus diterapkan dengan baik. Jika tidak, maka akan menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Pegawai negeri yang tidak kompeten mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 Implementasi perubahan pada area manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan, kompetensi dan perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh penerapan sistem manajemen SDM yang dimulai dari sisi perencanaan, pengadaan, hingga pemberhentian. Untuk itu, perlu dilakukan penataan dari berbagai aspek yang kaitannya dengan SDM sebagai aset penting dari organisasi. Adapun indikator kriteria keberhasilan pengembangan sumber daya manusia yaitu: Perencanaan kebutuhan pegawai, Proses penerimaan pegawai, Pengembangan pegawai, Promosi, mutasi, dan rotasi pegawai, Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai, Penegakan aturan disiplin/kode perilaku pegawai, dan Pengembangan sistem informasi kepegawaian.

Kompetensi merupakan salah satu ciri utama yang membentuk kemampuan individu untuk mencapai kinerja tinggi dalam bekerja. Hal ini mencakup pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan pegawai yang berkomitmen melayani masyarakat secara efisien, transparan, dan akuntabel. Kuantitas sumber daya manusia yang tersedia tanpa kualitas yang memadai dinilai masih kecil nilainya. Kualitas di sini mengacu pada kualitas sumber daya manusia, meliputi kemampuan fisik dan non fisik, seperti kecerdasan dan kesehatan mental. Agar dapat menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara lebih efektif, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu syarat utama.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2022 Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Pada peraturan ini menjelaskan tentang bahwa pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil melalui jalur pendidikan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian serta kompetensi tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, sikap dan kepribadian profesional PNS dalam pengembangan karier di pemerintah daerah.

Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam suatu organisasi merupakan aset penting yang dapat menjadi pendukung kemajuan organisasi melalui pelatihan dan pengembangan agar dapat beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah dan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.



Sumber daya manusia yang berkualitas berperan penting dalam memajukan suatu organisasi. Relevansi pelatihan dan pengembangan pegawai dapat dilihat dari sebagian struktur organisasi saat ini. Suatu organisasi harus mampu menghadapi pesaingnya. Salah satu yang dapat menunjangnya adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam setiap kegiatan organisasi. Meskipun didukung dengan sarana dan prasarana, serta sumber dana yang menjanjikan, namun kurangnya sumber daya manusia yang dapat diandalkan, kegiatan organisasi tidak akan terselenggara dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Sumber daya manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya (Fajar dan Heru 2013:29) dalam (pratiwi, faradila, & lashania, 2022).

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu perangkat daerah pemerintah Kabupaten Dharmasraya wajib melaksanakan reformasi birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mengikuti prioritas nasional yang menjadi dasar pelaksanaan perubahan reformasi. Salah satu bidang reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya adalah sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia sangat berperan penting sebagai penggerak roda organisasi, dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memenuhi pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan sumber daya manusia yang baik, akan dapat membentuk ASN yang memiliki keinginan untuk dapat berbuat dan berkinerja baik tentunya dibutuhkan ASN yang memiliki jiwa inovatif. (Zulfia & Frinaldi, 2023).

SDM yang baik akan membantu Dinas koperasi usaha kecil menengah dan perdagangan dalam memaksimalkan potensi pegawai, meningkatkan pelayanan publik, serta merespons perubahan dengan cepat dan tepat.

Menurut Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 masih banyak kualitas SDM yang harus dibenahi. Sebanyak 62 ASN yang bekerja di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya sumber daya manusia tenaga harian lepas/honorar sebanyak 33 orang. Rendahnya kualitas SDM dan terbatasnya anggaran dalam melaksanakan pelayanan sesuai tugas dengan fungsinya menyebabkan koperasi dan UMKM tidak dapat dikelola secara maksimal. Rendahnya kualitas SDM menyebabkan rendahnya partisipasi anggota dalam pelaksanaan RAT. Selain itu Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya belum memiliki data seluruh potensi UMKM secara update, yang menyebabkan pangsa produk UMKM menengah ke bawah. Selain itu, beberapa pegawai tidak di tempatkan sesuai dengan bidang dan keahliannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis melakukan wawancara langsung kepada pegawai di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya yaitu Bapak Elvadrial, SE., M.Si selaku sekretariat pada tanggal 19 maret 2024 beliau mengatakan :

“... Selama penyelenggaraan dilaksanakan dikantor ini tentu saja banyak ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi penghambat dalam mendukung reformasi birokrasi. Sehingga Citra koperasi dimata masyarakat menjadi berkurang. Hal ini disebabkan berbagai macam hal, termasuk ASN sebagai pelaksana pemerintahan. Faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan reformasi birokrasi dalam pengembangan sumber daya manusia , yaitu dikarenakan ketersediaan dana belum ada, dimana dana tersebut masih berada di BKSDM sehingga menyebabkan pengelolaan UMKM belum maksimal.

Selanjutnya pemerintah pusat tidak ada melakukan perekrutan pegawai sejak tahun 2021-2023 sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kurang optimal, karena ada beberapa pegawai yang ditempatkan tidak sesuai bidangnya. Untuk tahun 2024 ini pemerintah baru melakukan perekrutan pegawai tetapi tidak diangkat sebagai PNS namun sebagai P3K. Melihat kondisi yang demikian maka kualitas seorang Aparatur sipil negara (ASN) di kantor harus terus ditingkatkan untuk menunjang keberhasilan dinas ini sesuai dengan visi misinya dan bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Untuk meningkatkan kualitas SDM maka dilaksanakanlah reformasi birokrasi dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur. ”

Penulis juga melakukan wawancara kepada Bapak Mukhlis, S.AP.,

M.M selaku Kabid Koperasi beliau mengatakan:

“... Untuk koperasi sendiri anggaran yang diberikan oleh APBD untuk mengelola UMKM memang masih minim, sehingga peningkatan UMKM tidak ada. Hal ini menyebabkan partisipasi dalam RAT itu menurun, ya karena minimnya anggaran, laporan keuangan masih belum direkap secara sempurna, tidak adanya kegiatan koperasi serta infrastruktur yang tidak memadai.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Bapak Rianda Halim

MA selaku Staff Koperasi beliau mengatakan:

“... Di bidang reformasi birokrasi untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia aparatur, ada beberapa program yang dibuat oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya, yaitu program pelatihan manajemen akuntansi berbasis IT dan pelatihan manajemen UMKM. Program pelatihan ini diharapkan dapat mengubah sistem koperasi menjadi lebih baik dalam kerangka reformasi birokrasi. Program ini dilaksanakan oleh dinas, dan peserta yang mengikuti pelatihan ini dipilih oleh dinas. Namun terdapat kendala dalam melaksanakan program pelatihan dalam rangka reformasi birokrasi, salah satunya adalah pendanaan dan infrastruktur yang belum mencukupi ”

Penelitian (Sugiarto, 2019), menyatakan sumber daya manusia perlu terus dikembangkan agar menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti yang sebenarnya, yaitu pekerjaan yang dilakukan menghasilkan sesuatu yang memang dikehendaki.

Berkualitas bukan hanya tentang kepintaran saja, namun juga tentang kualitas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang benar-benar terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Kualitas kerja mengacu pada keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga dilaksanakan pada waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh pegawai yang mempunyai tanggung jawab besar terhadap tugas-tugas dan kewajiban yang diberikan, baik tanggung jawab pribadi maupun sosial. Maka dari itu, perlu ada upaya dari pemerintah dalam memperbaiki kualitas ASN agar menjadi ASN yang profesional untuk dapat terus dilakukan. Perbaikan tersebut juga didukung dengan adanya pengembangan kompetensi ASN di masing-masing instansi dan bagaimana instansi tersebut dapat mencapai target dalam upaya pengembangan kompetensi tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Implementasi Reformasi Birokrasi Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya** ”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti memilikiidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan program pelatihan dalam kerangka reformasi birokrasi bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur Di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasrayamenyebabkan UMKM tidak dapat dikelola dengan baik

2. Infrastruktur yang kurang memadai menyebabkan pelaksanaan program pelatihan dalam kerangka reformasi birokrasi bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur Di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
3. Kurangnya ketersediaan pegawai Di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya menyebabkan pelaksanaan reformasi birokrasi bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur Di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
4. Terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan program pelatihan dalam kerangka reformasi birokrasi bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur Di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya menyebabkan UMKM tidak dapat dikelola dengan baik.

#### **C. Pembatasan Masalah**

Dari identifikasi masalah di atas, dapat peneliti batasi masalah yang dibahas pada penelitian ini yaitu tentang implementasi reformasi birokrasi dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari batasan masalah di atas, dapat diketahui rumusan masalahnya sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi reformasi birokrasi dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya?
- b. Apa saja faktor penghambat reformasi birokrasi dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya?
- c. Apa upaya yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya dalam Reformasi Birokrasi bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur?

#### **E. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mendeskripsikan implementasi reformasi birokrasi dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya
- b. Untuk menganalisis faktor penghambat reformasi birokrasi dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya
- c. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya dalam Reformasi Birokrasi bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur

#### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitiannya, yaitu:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan administrasi negara, yaitu matakuliah birokrasi dan governansi publik, administrasi kepegawaian, manajemen sumber daya manusia sektor publik,

manajemen dan pelayanan publik, perilaku organisasi dan budaya organisasi.

b. Secara Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pengembangan sumber daya manusia aparatur dalam mendukung reformasi birokrasi di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi pihak lain yang tertarik melakukan penelitian terkait permasalahan yang sama